



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (STOP BABS) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DI DESA BANYU TAJUN HILIR, DESA TAMBALANG TENGAH, DAN DESA RANTAU KARAU TENGAH)

Anita Rahmayanti

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail: anitarahmayanti021@gmail.com

Article History:

Received: 14-04-2024

Revised :05-05-2024

Accepted: 16-05-2024

Keywords:

Implementasi,
Kebijakan, Peraturan
Daerah, Stop BABS

Abstract: Masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai menggunakan jamban untuk buang air besar dikarenakan kurangnya kesadaran dan menjadi kebiasaan buruk masyarakat setempat. Masih belum adanya larangan dan penerapan sanksi sesuai pada Pasal 17 ayat 3. Masyarakat sudah diberikan bantuan WC oleh pemerintah daerah, namun mereka masih buang air besar sembarangan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Di Desa Banyu Tajun Hilir, Desa Tambalang Tengah, dan Desa Rantau Karau Tengah) serta faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe dekriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui teknik penarikan informan yang berjumlah 15 orang. Dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Uji kredibilitas data pada penelitian ini perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, dan mengadakan membercheck. Hasil dari penelitian ini tidak efektif, dapat dilihat; Kejelasan standar dan sasaran kebijakan tidak diketahui secara spesifik. Ukuran Standar Kebijakan tidak diketahui masyarakat secara rinci. Sumberdaya Non Manusia sudah cukup merata. Sumber daya Manusia tidak sesuai mekanisme pengelolaan. Dukungan instansi lain yang sudah terjalin baik. Koordinasi dengan instansi lain adanya kerjasama antar instansi. Dukungan Elit Politik dalam perwujudan penuntasan jamban liar di sungai. Opini Publik yang negatif. Kondisi Sosial masyarakat masih buang air besar disungai. Kondisi Ekonomi masyarakat rendah. Kondisi Politik yang tidak

berdampak terhadap masyarakat. Pemahaman pelaksana kebijakan tidak memahami standar dan ukuran kebijakan. Tingkat komitmen Pelaksana kebijakan yang tidak memiliki komitmen yang kuat. Faktor yang menghambat yaitu Tidak adanya informasi tentang isi peraturan daerah. Belum adanya mekanisme yang sesuai dengan pengelolaan. Pandangan buruk masyarakat terhadap kebijakan. Perilaku masyarakat yang membudaya menggunakan jamban. Kondisi ekonomi masyarakat yang rendah. Peraturan masih berupa himbauan dan belum adanya penerapan sanksi tegas. Pelaksana gerakan tidak mengetahui secara keseluruhan dari isi Peraturan. Pelaksana gerakan tidak memahami mengenai isi Peraturan daerah; Upaya yang dapat dilakukan dengan Meningkatkan sosialisasi. Memanagemen waktu kegiatan secara terjadwal. Meningkatkan Program Bantuan WC. Penerapan sanksi yang tegas sesuai isi peraturan daerah. Disarankan agar melakukan sosialisasi secara terbuka mengenai isi dari peraturan daerah, serta perlunya sosialisasi seperti pemasangan stiker, pampflet, broser. Dan perlu adanya sanksi pada Pasal 17 ayat 3 sesuai isi Peraturan Daerah agar adanya efek jera..

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Kecamatan Sungai Pandan adalah salah satu daerah di Hulu Sungai Utara yang dilalui oleh anak sungai nagara. Kebiasaan buruk masyarakat yang menggunakan jamban di desa Banyu Tajun Hilir yang diperkirakan 55 buah jamban, desa Tambalang Tengah 22 buah jamban, dan desa Rantau Karau Tengah kurang lebih 16 buah jamban yang digunakan untuk membuang air besar sembarangan dan melakukan aktivitas mencuci, mandi, serta aktivitas lainnya di sungai dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat.. Pola BAB (Buang Air Besar) pada masyarakat di tentukan oleh persepsi masyarakat.

Masyarakat menganggap tindakan tersebut adalah hal yang biasa dilakukan karena belum adanya larangan yang tidak memperbolehkan mereka BAB sembarangan dan belum adanya penerapan sanksi sesuai Peraturan Daerah pada pasal 17 ayat 3. Partisipasi masyarakat dalam mendorong keberhasilan proyek jamban sehat untuk merubah kebiasaan dengan beralih menggunakan jamban sehat belum sepenuhnya dilakukan disebabkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, sikap mental, faktor ekonomi dan kondisi sosial masyarakat.

Dari fenomena masalah yang ada dapat dijelaskan bahwa yaitu:

1. Masyarakat yang tinggal di pinggir sungai masih ada yang menggunakan jamban untuk buang air besar karena masih kurangnya kesadaran dan sudah menjadi kebiasaan buruk masyarakat setempat di desa Banyu Tajun Hilir, desa Tambalang Tengah, dan desa Rantau Karau Tengah, sehingga pelaku BABS masyarakat setempat tidak sesuai dengan maksud dan tujuan peraturan daerah yang terdapat pada pasal 2 ayat 1.

2. Masih adanya jamban di desa Banyu Tajun Hilir yang diperkirakan sekitar 55 buah jamban, desa Tambalang Tengah kurang lebih 22 buah jamban, dan desa Rantau Karau Tengah kurang lebih 16 buah jamban, karena masih belum adanya larangan yang tidak memperbolehkan mereka BAB sembarangan dan penerapan sanksi yang termasuk pada pasal 17 ayat 1 dan pasal 17 ayat 3 yang berbunyi : *"Pada ayat (1) Setiap orang dilarang mendirikan atau membangun jamban umum dan/atau danau yang ditetapkannya sebagai Kawasan yang dilarang BABS"*.
3. Masyarakat sudah diberikan fasilitas pembangunan jamban sehat yang merupakan program dari pemerintah daerah untuk mengubah perilaku kebiasaan BABS sembarangan, namun mereka masih buang air besar sembarangan (BABS) aliran disungai.

Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan teori Donald Van Metter & Carl van Horn dalam (Dedy Mulyadi 2016 : 72-73), yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan;
2. Sumber daya;
3. Komunikasi antar Organisasi dan penguatan aktivitas;
4. Karakteristik agen Pelaksana;
5. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik;
6. Disposisi Implementator.

Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

Faktor apa saja yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara ?

LANDASAN TEORI

Implementasi

Menurut Donald Meter dan Van Horn dalam (Dedy Mulyadi 2016 : 72-73) menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu : Standar dan Target Kebijakan: Kebijakan harus memiliki standar dan target yang jelas dan terdefinisi dengan baik untuk mencegah perbedaan interpretasi di antara para pelaksana kebijakan. Kejelasan ini penting agar semua pihak yang terlibat memahami tujuan dan cara mencapainya.

Sumber Daya: Untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif, diperlukan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun non-manusia. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, kebijakan tidak bisa dijalankan dengan baik.

Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas: Koordinasi yang baik antara berbagai instansi atau organisasi seringkali diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif membantu memastikan semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama dan mengurangi risiko miskomunikasi atau duplikasi usaha.

Karakteristik Agen Pelaksana: Kelompok-kelompok kepentingan yang mendukung implementasi kebijakan memiliki peran penting dalam proses ini. Dukungan dan partisipasi mereka bisa sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik: Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung. Sumber daya ekonomi yang tersedia serta stabilitas sosial dan politik dapat memfasilitasi atau menghambat pelaksanaan kebijakan.

Disposisi Implementor: Sikap atau disposisi dari mereka yang mengimplementasikan kebijakan sangat penting. Ini meliputi:

- Respon Implementor terhadap Kebijakan: Bagaimana para implementor merespons kebijakan tersebut.
- Kognisi: Pemahaman para implementor terhadap kebijakan dan harapan yang terkait.
- Intensitas Disposisi: Preferensi nilai yang dimiliki oleh para implementor, yang mencerminkan seberapa kuat mereka mendukung atau menentang kebijakan tersebut.

Kebijakan Publik

Kebijakan adalah keputusan yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip tertentu untuk mengarahkan tindakan yang direncanakan secara konsisten guna mencapai tujuan spesifik. Di sisi lain, dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, istilah "publik" biasanya diartikan sebagai negara atau masyarakat umum.

Kebijakan publik adalah salah satu produk dari pelaksanaan pemerintahan, selain pelayanan publik, barang publik, dan regulasi. Karena itu, substansi dan proses kebijakan publik selalu berhubungan dengan berbagai aspek pemerintahan, seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Bentuk negara sangat mempengaruhi substansi dan proses kebijakan publik, terutama karena negara berfungsi sebagai kerangka dalam proses kebijakan publik.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini melibatkan prosedur yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan, serta perilaku yang dapat diamati dari individu. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami latar belakang dan individu secara menyeluruh.

B. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam objek penelitian. Artinya, penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan semua aspek atau berbagai hal terkait dengan objek yang diteliti.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

a) Data primer

Data primer adalah data yang hanya bisa diperoleh langsung dari sumber asli atau pertama. Data ini dikumpulkan secara langsung oleh pihak yang berkepentingan atau individu yang terlibat langsung dalam pengumpulan data tersebut.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data pendukung yang digunakan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan, seperti dokumen-dokumen pendukung ataupun buku maupun dari internet.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu, teknik dilakukan dengan cara menunjukkan langsung kepada orang-orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi. Jumlah Informan dalam penelitian ini adalah 15 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Semua teknik analisis data kualitatif sangat terkait dengan metode pengumpulan data. Teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi: 1) Observasi, yaitu teknik mengumpulkan data dengan mengamati langsung kegiatan yang sedang berlangsung. 2) Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada informan atau responden. 3) Dokumentasi, yaitu teknik mengumpulkan data dari sumber-sumber yang dianggap relevan, seperti rekaman, makalah, buku, surat, dan sumber informasi lainnya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif melibatkan beberapa langkah penting, mulai dari bekerja dengan data, mengorganisasikannya, hingga memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, serta memutuskan apa yang akan disampaikan kepada orang lain. Teknik analisis data ini dibagi menjadi tiga bagian: 1) Reduksi data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data "kasar" yang diperoleh dari catatan lapangan. 2) Penyajian data, yang merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. 3) Penarikan kesimpulan, yaitu kegiatan untuk membuat konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan ini diverifikasi sepanjang proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus di Desa Banyu Tajun Hilir, Desa Tambalang Tengah, dan Desa Rantau Karau Tengah)

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

a) Kejelasan standar dan Sasaran Kebijakan

Kejelasan standar dan sasaran kebijakan belum baik karena tidak diketahui secara keseluruhan dan rinci oleh pelaku atau pelaksana kebijakan di Desa Banyu Tajun Hilir, Tambalang Tengah, dan Rantau Karau Tengah, dikarenakan tidak adanya sosialisasi secara khusus untuk memberikan informasi mendalam tentang standar dan sasaran kebijakan.

b) Ukuran Standar Kebijakan

Ukuran standar kebijakan belum baik karena tidak diketahui tidak diketahui dan tersampaikan dengan rinci kepada para Pelaksana kebijakan dengan baik di Desa Banyu Tajun Hilir, Tambalang Tengah, dan Rantau Karau Tengah sehingga pencapaian ukuran standar kebijakan tidak terpenuhi dengan baik atau maksimal sesuai pedoman ukuran standar Gerakan Stop BABS yang bertujuan agar masyarakat yang masih menggunakan jamban untuk merubah kebiasaan menggunakan WC sehat dan poin lainnya yang disebutkan dalam ketetapan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Sumber Daya

a) Sumber Daya Manusia

Keadaan petugas atau Sumber Daya Manusia dalam kebijakan STOP BABS ini kurang baik karena belum adanya penyampaian oleh Petugas Sanitasi berupa pengelolaan, pengetahuan, dan pembelajaran mengenai standar dan ukuran dari isi peraturan kepada masyarakat di Desa Banyu Tajun Hilir, Tambalang Tengah, dan Rantau Karau Tengah, sehingga belum sesuai dengan mekanisme STOP BABS Pasal 5 ayat 1.

b) Sumber Daya Non Manusia

Anggaran dana atau Sumber Daya Non Manusia sudah cukup baik. Karena di desa Tambalang Tengah dan Rantau Karau Tengah anggaran dana desa khusus dianggarkan untuk pembangunan WC gratis. Sedangkan di Desa Banyu Tajun Hilir untuk pembangunan WC masih belum merata karena penduduk desa yang banyak dan desanya yang luas.

3. Komunikasi antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

a) Dukungan dari Instansi Lain

Dukungan dari instansi lain sudah baik karena adanya dukungan dari instansi di Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti di Desa Banyu Tajun Hilir, Tambalang Tengah, dan Rantau Karau Tengah karena adanya dukungan dalam perubahan perilaku ataupun pembiayaan untuk pembangunan WC sehat.

b) Koordinasi dengan Instansi Lain

Koordinasi dengan instansi-instansi terkait sudah baik dengan adanya penyuluhan dari dinas kesehatan dan puskesmas terkait perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, di masing-masing Desa Banyu Tajun Hilir, Tambalang Tengah, dan Rantau Karau Tengah.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

a) Opini Publik

Opini publik belum baik, karena sebagian besar masyarakat Desa Banyu Tajun Hilir dan desa Tambalang Tengah, tidak berpandangan positif dengan program STOP BABS, sedangkan masyarakat Desa Rantau Karau Tengah masih sebagian kecilnya masih menggunakan jamban akan tetapi sebagian besar dari masyarakatnya sudah beropini positif dengan beralih menggunakan jamban sehat.

b) Dukungan Elit Politik

Dukungan elit politik sudah baik karena sudah terlihat dukungan pemerintah dengan adanya bantuan pembangunan WC. Untuk mewujudkan Hulu Sungai Utara bebas jamban.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

a) Kondisi Sosial

Kondisi sosial belum baik karena sebagian besar masyarakat di Desa Banyu Tajun Hilir dan Tambalang Tengah masih merasa nyaman untuk BAB di aliran sungai, sedangkan hanya sebagian kecil masyarakat Rantau Karau Tengah masih BAB disungai dikarenakan masyarakat disana sudah membiasakan diri dengan menggunakan jamban sehat dirumah.

b) Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masih belum baik. Karena masyarakat di Desa Banyu Tajun Hilir dan Rantau Karau Tengah bekerja sebagai besar adalah petani, selain itu pada desa Tambalang Tengah bekerja sebagai buruh tani sehingga masih banyak nya warga yang merasa tidak mampu untuk membuat WC dengan uang sendiri.

c) Kondisi Politik

Kondisi politik belum baik. Karena masyarakat di Desa Banyu Tajun Hilir masih menggunakan jamban karena bantuan WC belum merata sehingga larangan Stop BABS masih berupa himbauan, dan di desa Tambalang Tengah dan Rantau Karau Tengah masih berpatokan dengan desa tetangga seperti desa Banyu Tajun Hilir yang masih menggunakan jamban.

6. Disposisi Implementor

a) Tanggapan Pelaksana Kebijakan

Tanggapan pelaksana kebijakan sudah baik, selain itu tanggapan pelaksana kebijakan seperti aparat desa di Desa Banyu Tajun Hilir, Tambalang Tengah, dan Rantau Karau Tengah mendukung dengan adanya kebijakan Stop BAB Sembarangan karena memandang kebijakan ini mempunyai dampak yang positif.

b) Pemahaman Pelaksana Mengenai Kebijakan

Pemahaman pelaksana kebijakan kurang baik karena mayoritas masyarakat di Desa Banyu Tajun Hilir, Tambalang Tengah, dan Rantau Karau Tengah sebagai pelaksana kebijakan tidak mengetahui secara jelas dan lengkap tentang isi (standar dan ukuran) kebijakan Gerakan Stop BABS ini. Edukasi yang diberikan hanya sampai pada tahap himbauan pelarangan gerakan BAB sehingga pelaksanaan kebijakan Stop BAB Sembarangan tidak dapat berjalan sesuai dengan mestinya.

c) Tingkat Komitmen Pelaksana Terhadap Kebijakan

Para pelaksana kebijakan Peraturan Stop BABS di Desa Banyu Tajun Hilir, Tambalang Tengah, dan Rantau Karau Tengah tidak memiliki komitmen dan belum baik yang kuat dalam menjalankan Kebijakan tersebut dikarenakan pelaksana kebijakan tidak memahami mengenai tentang isi (standar dan ukuran) kebijakan Gerakan Stop BABS sehingga dengan tidak adanya komitmen yang kuat maka tujuan yang hendak dicapai dari Kebijakan program Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kecamatan Sungai Pandan.

B. Faktor – Faktor yang Menghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS)

1. Sub Variabel Standar dan Sasaran Kebijakan Pada Indikator Kejelasan Standar dan Sasaran serta Pada Indikator Ukuran Standar Kebijakan
Faktor penyebabnya karena tidak disosialisasikan secara khusus dan menyeluruh mengenai isi dari peraturan daerah (standar dan ukuran) berupa pengetahuan, pengelolaan dan pembelajaran sesuai dari ketetapan peraturan daerah sehingga tidak diketahui dengan jelas dan lengkap.
2. Sub Variabel Sumber Daya pada Indikator Sumber Daya Manusia
Faktor penyebabnya adalah karena dari Dinas Kesehatan mengelola kegiatan yang lainnya, sehingga membuat terbatasnya waktu para petugas di Dinas Kesehatan yang tergabung dalam POKJA Sanitasi dalam melakukan penyampaian informasi secara mendalam berupa pengelolaan, pengetahuan, dan penyampaian mengenai Standar dan ukuran dari isi Peraturan .
3. Sub Variabel Karakteristik Agen Pelaksana pada Indikator Opini Publik
Faktor penyebabnya adalah kurangnya kesadaran mengenai dampak dari buang air besar sembarangan dan rendahnya pemahaman mengenai isi dari peraturan daerah (standar dan ukuran kebijakan)
4. Sub Variabel Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik Pada Indikator Kondisi Sosial.
Faktor penyebab adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampak dari buang air besar, selain itu masyarakat sudah merasa nyaman dalam penggunaan jamban
5. Sub Variabel Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik Pada Indikator Kondisi Ekonomi
Faktor penyebabnya adalah masyarakat tidak memiliki banyak penghasilan sehingga tidak mampu membeli WC sendiri
6. Sub Variabel Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik Pada Indikator Kondisi Politik
Faktor penyebab adalah tidak adanya sanksi tegas yang membuat masyarakat takut dan jera serta pembagian WC/akses sanitasi di beberapa desa yang belum merata
7. Sub Variabel Disposisi Implemntor Pada Indikator Pemahaman Pelaksana terhadap Kebijakan
Faktor penyebab adalah karena tidak disosialisasikan secara khusus dan menyeluruh berupa pengetahuan, pengelolaan dan pembelajaran mengenai isi

peraturan daerah.

8. Sub Variabel Disposisi Implementor Pada Indikator Tingkat Komitmen Pelaksana Terhadap Kebijakan.

Faktor penyebab adalah karena tidak disosialisasikan secara khusus dan menyeluruh berupa pengetahuan, pengelolaan dan pembelajaran mengenai isi peraturan daerah.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Faktor – Faktor yang Menghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS)

1. Meningkatkan sosialisasi mengenai Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan. Sosialisasi adalah proses mentransfer kebiasaan, nilai, dan aturan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu kelompok atau masyarakat, melalui berbagai metode seperti pemasangan stiker, pamflet, brosur, spanduk, dan lain sebagainya.
2. Memanagemen waktu kegiatan secara terjadwal
Perlunya manajemen waktu kegiatan secara terjadwal agar petugas Sanitasi dapat mempunyai slot waktu agar bisa memberikan informasi secara mendalam berupa pengetahuan, pengelolaan dan pembelajaran terkait isi peraturan daerah kepada masyarakat.
3. Meningkatkan program bantuan WC gratis
Melalui program bantuan WC Gratis, dengan adanya peningkatan program bantuan WC gratis maka pemerataan akses sanitasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilakukan lebih cepat air besar sembarangan dan masyarakat yang kurang mampu menjadi terbantu secara ekonomi, selain itu dapat merubah perilaku masyarakat sedikit demi sedikit menggunakan WC sehat.
4. Adanya penerapan Sanksi sesuai isi Peraturan daerah
Untuk mengubah kejadian buang air besar sembarangan, maka upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan sanksi yang sesuai dengan isi Peraturan Daerah Pasal 17 poin 3 kepada masyarakat agar dapat membuat masyarakat takut atau jera.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya di Desa Banyu Tajun Hilir, Tambalang Tengah, dan Rantau Karau Tengah, belum berjalan efektif. Di Desa Banyu Tajun Hilir, efektivitas belum tercapai karena belum semua warga memiliki fasilitas WC. Di Desa Tambalang Tengah, meskipun distribusi WC sudah cukup merata, efektivitas masih belum optimal karena masyarakat masih membandingkan dengan desa lain. Sementara itu, di Desa Rantau Karau Tengah, program ini cukup efektif karena fasilitas WC sehat sudah merata, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang masih menggunakan jamban berdasarkan standar desa lain.

Faktor- faktor yang menghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air

Besar Sembarangan (Stop BABS) Di Kecamatan Sungai Pandan studi kasus di Desa Banyu Tajun Hilir, Tambalang Tengah, dan Rantau Karau Tengah ada 8 faktor yaitu: *Pertama*, Tidak adanya penyampaian informasi tentang kejelasan standar serta ukuran kebijakan tentang gerakan Stop BABS kepada pelaksana gerakan. *Kedua*, Sumber daya manusia yang belum sesuai dengan mekanisme pengelolaan gerakan Stop BABS. *Ketiga*, Pandangan buruk (aksi penolakan) masyarakat terhadap gerakan stop BABS. *Keempat*, Perilaku masyarakat di Kecamatan Sungai Pandan yang sudah terbiasa menggunakan jamban sehingga juga menyebabkan buang air besar disungai. *Kelima*, kondisi ekonomi masyarakat yang rendah. *Keenam*, Masyarakat masih buang air besar disungai karena Peraturan tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan masih berupa himbauan dan belum adanya penerapan sanksi tegas. *Ketujuh*, Pelaksana gerakan tidak mengetahui secara jelas dan lengkap mengenai isi Peraturan daerah Stop BABS (standar dan ukuran). *Kedelapan*, Pelaksana gerakan tidak memahami mengenai isi Peraturan daerah (standar dan ukuran) kebijakan Gerakan Stop BABS,.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di Kecamatan Sungai Pandan adalah: *Pertama*, meningkatkan sosialisasi mengenai isi peraturan daerah tentang Gerakan Stop BABS. *Kedua*, mengatur waktu kegiatan secara terjadwal. *Ketiga*, meningkatkan program bantuan WC gratis. *Keempat*, menerapkan peraturan sesuai dengan isi peraturan daerah.

SARAN

1. Kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk dapat melakukan sosialisasi secara terbuka mengenai isi dari perda secara terbuka dan menyeluruh. Selain itu juga perlunya sosialisasi dengan berbagai cara yang lain seperti pemasangan stiker, pamphlet, broser, spanduk, dan lain-lainnya.
2. Kepada Pihak Lembaga Terkait Perlunya perhatian khusus dari pemerintah dengan melakukan efek jera atau sanksi sesuai isi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) pada pasal 17 ayat 1 dan pasal 17 ayat 3.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Anonim. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS). (Online)
- [2] Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/17059/perda-kab-hulu-sungai-utara-no-4-tahun-2016>
- [3] Anonim. 2017. ODF (Open Defecation Free) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan. Website Desa Pegirangan Kecamatan Bantar Bolang Pemerintah Kabupaten Pematang. (Online)
- [4] Ahmad Jamaluddin. 2015, Metode Penelitian Administrasi Publik (Teori Dan Aplikasi). Yogyakarta. Gava Media
- [5] Agustino,Leo. 2016, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- [6] Apriatman, Nur. 2011, Stop Buang Air Besar Sembarangan, Jakarta: Waspol Facility

- [7] Mulyadi, Dedy. 2016, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik). Bandung: Alfabeta
- [8] Indiahono, Dwiyanto. 2017. "Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media
- [9] Maleong J. Lexy. 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- [10] Satori Djam'an, Komariah Aan.2014, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- [11] Subarsono, 2015, Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), Yogyakarta: Pustaka Belajar
- [12] Sugiyono. 2014, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- [13] Wahab Solichin Abdul.2012, Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan). Jakarta: Bumi Aksara